BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Seperti kita ketahui bahwa pemerintah menjadikan penerimaan pajak menjadi sektor tumpuan dalam penerimaan APBN, dimana hal ini terjadi karena Negara kita tidak lagi mengandalkan pendapatan dari migas dan utang dari luar negeri sehingga tujuan pemerintah untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri dalam hal pembiayaan dan pembangunan dalam negeri tercapai. Mengingat perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dinamis, penerapannya harus senantiasa mengikuti dinamika perekonomian, baik domestik maupun internasional (Rosdiana, 2006). Mengingat adanya dua fungsi yang melekat pada pajak (*budgetair* dan *regulerend*), maka dalam pemungutan pajak bukan hanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, juga menggenjot penerimaan negara. Oleh karena itu, setiap tahun Dirjen Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan (Rahayu, 2007).

Oleh sebab itu, tuntutan kerja yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentunya juga semakin besar. Dengan demikian, DJP harus dapat merealisasikan tugas yang diamanatkan tersebut sehingga DJP dituntut semakin aktif dalam mencari solusi-solusi dalam pemenuhan target tersebut dengan cara

menggali segala potensi-potensi perpajakan yang ada di seluruh Negara ini yang tentunya berdasarkan kepada undang-undang yang berlaku.

Penerimaan pemerintah dari sektor pajak memang sudah tinggi tapi seiring dengan semakin tingginya kebutuhan akan keperluan yang dibutuhkan pemerintah untuk mejalankan roda pemerintahannya maka penerimaan disektor pajak harus lebih ditingkatkan kembali. Pemerintah tentunya memiliki cara agar penerimaan pajak dapat meningkat, yang ditetapkan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Di Indonesia sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur, yaitu *Tax Policy, Tax Law,* dan *Tax Administration.* Jika semua unsur ini dijalankan dengan baik maka pengelolaan penerimaan dan pengeluaran di Indonesia dapat berjalan dengan baik, karena ketiga unsur tersebut mempunyai keterkaitan yang kuat. Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan (2006:25), sistem perpajakan terdiri dari : *1). Official Assesment System 2). Semi Self Assesment System 3). Full Self Assesment System 4). With Holding System.*

Untuk memberikan kemanan dan kenyamanan dalam hal pemungutan pajak, DJP memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sistem seperti ini kita kenal dengan *Self Assessment System.* Dengan demikian tugas DJP semakin mudah, melainkan melahirkan tantangan tersendiri. Karena dengan sistem yang dianut ini, tentunya akan muncul kecurangan-kecurangan dalam hal pemungutan pajak yang dapat berasal dari dalam (pegawai DJP) maupun yang berasal dari luar (Wajib Pajak), sehingga DJP harus semakin was-was dalam melaksanakan tugasnya dan diperlukan kesadaran dari semua kalangan bahwa

pajak sangat diperlukan bagi Negara kita dalam membiayai operasionalnya seperti pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan orang banyak. Dan kita juga mengetahui bahwa kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih jauh dari harapan. Hal ini dapat kita ketahui dari jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika kita bandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa. Peran aktif DJP melalui aparat-aparatnya sangat diperlukan untuk selalu memberi pengarahan dan menyadarkan masyarakat arti pentingnya pajak bagi Negara ini. Dan yang lebih penting manfaat pajak harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat agar kesadaran mereka dalam pemenuhan kewajiban perpajakan semakin tumbuh berkembang.

Semakin berkembangnya dunia bisnis di era globalisasi sekarang, DJP tentu harus selalu mengutamakan pelayanan yang selalu prima & bermutu dan juga tidak lupa untuk tetap mempertimbangkan aspek keadilan masyarakat guna menunjang tugas utama dari DJP yaitu menambah pendapatan Negara melalui penerimaan pajak. Dengan sistem perpajakan yang ada sekarang, sudah pasti DJP memerlukan ketersediaan data yang lengkap, akurat, dan sistem administrasi perpajakan yang modern serta dapat diandalkan yang tidak kalah jika dibandingkan dengan system perpajakan Negara lainnya.

Data-data yang dimaksud di atas dapat berupa Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP), Alat Keterangan (Alket), dan sebagainya. Yang menjadi pembahasan penulis adalah tentang :

“Tinjauan Atas Penerimaan dan Pengolahan Data Surat Pemberitahuan Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang ”

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Tujuan penulisan ini mengenai tinjauan atas pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pihak yang terkait dalam pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Sumedang.
2. Mengetahui formulir yang digunakan dalam prosedur penerimaan dan pengolahan SPT Masa PPN di KPP Pratama Sumedang.
3. Mengetahui dokumen yang dihasilkan dalam prosedur penerimaan dan pengolahan SPT Masa PPN di KPP Pratama Sumedang.
4. Mengetahui prosedur penerimaan dan pengolahan SPT Masa PPN di KPP Pratama Sumedang.
5. Mengetahui jangka waktu penyelesaian SPT Masa PPN di KPP Pratama Sumedang.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi informasi tentang bagaimana prosedur Penagihan Pajak pada KPP Pratama Sumedang.

2. Bagi Instansi

   Sebagai masukan dan bahan untuk mengevaluasi tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak pada KPP Pratama Sumedang.

3. Bagi Pihak Lain

   Dapat memberikan masukan sebagai bahan informasi mengenai pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak pada KPP Pratama Sumedang. Selain itu, hasil laporan kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran terutama bagi yang akan mengadakan tinjauan kerja praktek mengenai pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap pelunasan utang pajak.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam rangka penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini, penulis mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dengan menggunakan beberapa metode penelitian antara lain :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

   Metode Penelitian Kepustakaan ini digunakan oleh penulis untuk mendukung landasan teori yang akan dituangkan ke dalam laporan, maka penulis mengumpulkan data-data yang berasal dari literatur-literatur yang sesuai dengan judul antara lain : buku-buku, kitab ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

a. Metode Pengamatan Langsung (Observasi)

Adalah penelitian data dengan melakukan pengamatan langsung atas kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan obyek yang diteliti sehingga diperoleh data yang akurat untuk menunjang landasan data dan fakta serta analisa data dan permasalahan.

b. Metode Wawancara

Melalui metode wawancara, penulis mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Penulis melakukan Kerja Praktek di KPP Pratama Sumedang yang berlokasi di JL. H. Ibrahim Adjie No. 372 Bandung. Telepon : 022-7333256, 7333225 Faksimile : 022-7337086.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Waktu Kerja Praktek dilaksanakan mulai dari tanggal 4 Juli 2011 sampai dengam 29 Juli 2011. Berikut ini adalah aktivitas kerja praktek dan aktivitas pada KPP Pratama Sumedang

Tabel 1.1

Aktivitas Kerja Praktek dan Aktivitas di Kantor

NO	AKTIVITAS	HARI	WAKTU	PENEMPATAN
1	Kerja Praktek	Senin s/d Jumat	07.30-16.00 WIB	Seksi Pelayanan
2	Istirahat	Senin s/d Kamis	12.00-13.00 WIB	
		Jumat	12.00-13.30 WIB	
3	Libur	Sabtu s/d Minggu	-	

Tabel 1.2

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

No.	Kegiatan	Mei 2011	Juni 2001	Juli 2011	Ags 2011	Sept 2011	Okt 2011	Nov 2011	Des 2011
1.	**Tahap persiapan KP**								
	1.Mengambil surat izin KP								
	2.Mencari tempat KP								
	3.Pengajuan KP ke Instansi								
	4.Persetujuan KP dari Instansi								
	5.Mendapat absen KP								
2.	**Pelaksanaan KP**								
	1.Registrasi								
	2.Kerja Praktek								
	3.Selesai KP								
3.	**Pelaporan KP**								
	1.Pengajuan judul KP								
	2.Bimbingan KP								
	3.Revisi								
	4.Pengumpulan data								
	5.Ujian KP								
	6.Pengumpulan laporan								